LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Inayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang didalamnya berisi mengenai capaian atas perjanjian kinerja pemerintah daerah yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai Sasaran Strategis yang termuat dalam RPD 2023-2026 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Salakan, 25 Maret 2025

RUSLI MOIDADY

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran kinerja utama yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan diformulasikan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka Akuntabilitas Instasi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan “Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata”.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun 2024, tetapi juga memuat kekurangan- kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2024 dapat dikatakan Memuaskan. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 2024.

Pengukuran kinerja terdiri dari 18 sasaran dengan 21 indikator yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tertuang dalam RKPD 2024 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Sasaran dan Indikator

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1	*2*	*3*	*5*
1	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	1 Buah
2	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	66,12%
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,48 Indeks
4	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	78,42%
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	100%
5	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	79,04%
6	Mengingkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	70%
7	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	80%
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	100%
9	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	100%
10	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
11	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	100
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai	80

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1	*2*	*3*	*5*
13	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehuatanan, dan Perikanan	3,75
14	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	2,81
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76
16	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,5 Indeks
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,5 Indeks
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	68,5 Indeks
17	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	163 Indeks
18	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100 Persen

Walaupun secara umum menunjukkan tren positif, namun capaian beberapa indikator belum seperti yang diharapkan, seperti yang berkategori Kurang Memuaskan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, antara lain:

1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan di dalam RPD 2023-2026. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah tertuang di dalam RPD 2023-2026 ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan

yang relatif besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas daerah.

2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam menyikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
3. Kurangnya suplai data dari perangkat daerah penanggung jawab pemenuhan target kinerja Pemerintah Daerah sehingga penentuan capaian kinerja mengalami banyak hambatan dan keterlambatan.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Perangkat Daerah, bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RPD 2023-2026. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Banggai Kepulauan. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh agar segera diterapkan dimasing-masing Perangkat Daerah sehingga terjalin suatu keterkaitan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga perencanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi RPD 2023-2026.
3. Perlu segera dibangun Sistem Pengelolaan Data Kinerja yang meliputi sistem pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan agar ukuran kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dapat benar-benar dipahami oleh masing-masing Perangkat Daerah. Untuk efektifitas perlu adanya suatu sistem pengumpulan data base secara elektronik melalui jaringan intranet maupun internet untuk validasi dan mempermudah dalam analisa kebijakan.

Semoga, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Banggai Kepulauan yang amanah, maju dan Sejahtera.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR DIAGRAM xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Aparat Pemerintah 2

1.3 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 4

1.4 Isu Strategis 5

1.4.1 Isu Strategis Daerah 5

1.4.2 Sistematika Penulisan 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

2.1 Visi 8

2.2 Misi 8

2.3 Tujuan dan Sasaran 14

2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 14

2.4 Rencana Kerja 2024 25

BAB IIII AKUNTABILITAS KINERJA 27

3.1 Pengukuran kinerja 27

3.2 Capaian Kinerja 31

3.2.1 Sasaran 1 Tersedianya Pelabuhan Laut Yang Memenuhi Standar 31

3.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan Untuk Konektivitas Wilayah 32

3.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya Daya Saing Daerah 33

3.2.4 Sasaran 4 Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh 34

3.2.5 Sasaran 5 Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi 36

3.2.6 Sasaran 6 Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum 37

3.2.7 Sasaran 7 Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak 38
3.2.8 Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan 39
3.2.9 Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 40
3.2.10 Sasaran 10 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 42
3.2.11 Sasaran 11 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata 44
3.2.12 Sasaran 12 Meningkatnya Profesionalitas Pegawai 45
3.2.13 Sasaran 13 Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 46
3.2.14 Sasaran 14 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian 48
3.2.15 Sasaran 15 Meningkatnya Ketahanan Pangan 50
3.2.16 Sasaran 16 Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan 51
3.2.17 Sasaran 17 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 53
3.2.18 Sasaran 18 Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 54
3.3 Realisasi Anggaran 56
3.3.1 Pendapatan 57
3.3.2 Belanja Daerah 57
3.3.4 Pembiayaan Daerah 57
3.3.5 Penghargaan 58
BAB IV PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran dan Indikator

Tabel 1.1 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2 : PNS berdasarkan pendidikan

Tabel 1.3 : PNS berdasarkan Golongan

Tabel 1.4 : PNS berdasarkan Jabatan

Tabel 1.5 : Jumlah ASN PPPK

Tabel 2.1 : Visi Kabupaten Banggai Kepulauan

Tabel 2.2 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025

Tabel 2.3 Prioritas Pembangunan Kab. Banggai Kepulauan, Sasaran Daerah serta Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

Tabel 3.1 Skala penilaian progres positif

Tabel 3.2 Skala penilaian progres negatif

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Kinerja/Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

Tabel 3.4 Capaian Sasaran I

Tabel 3.5 Capaian Sasaran 2

Tabel 3.6 Capaian Sasaran 3

Tabel 3.7 Capaian Sasaran 4

Tabel 3.8 Capaian Sasaran 5

Tabel 3.9 Capaian Sasaran 6

Tabel 3.10 Capaian Sasaran 7

Tabel 3.11 Capaian Sasaran 8

Tabel 3.12 Capaian Sasaran 9

Tabel 3.13 Capaian Sasaran 10

Tabel 3.14 Capaian Sasaran 11

Tabel 3.15 Capaian Sasaran 12

Tabel 3.16 Capaian Sasaran 13

Tabel 3.17 Capaian Sasaran 14

Tabel 3.18 Capaian Sasaran 15

Tabel 3.19 Capaian Sasaran 16

Tabel 3.20 Capaian Sasaran 17

Tabel 3.21 Capaian Sasaran 18

Tabel 3.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Capaian Indikator Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan berupa fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan dengan mengedepankan wewenang yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 3 dengan tujuan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, salah satunya dapat diukur melalui penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintahdaerah.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2024 berjumlah 6.972 orang yang terdiri dari :

Jumlah ASN PNS Berdasarkan :

a. Jenis kelamin

Tabel 1.1 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

INSTANSI	L	P	JUMLAH
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	1417	1533	2950

Sumber : BKPSDM Banggai Kepulauan

b. Pendidikan

Tabel 1.2 : PNS berdasarkan pendidikan

INSTANSI	S.3			S.2			S.1			D.IV			D.III			D.II			D.I			SMA			SMP			SD			JUMLAH
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	2	0	2	96	75	171	851	973	1824	20	27	47	94	257	351	48	57	105	0	3	3	303	140	443	3	1	4	0	0	0	2950

Sumber : BKPSDM Banggai Kepulauan

c. Golongan ruang

Tabel 1.3 : PNS berdasarkan Golongan

INSTANSI	GOLONGAN IV									GOLONGAN III									GOLONGAN II								GOLONGAN I								TOTAL
	IV/d		IV/c		IV/b		IV/a		JUMLAH	III/d		III/c		III/b		III/a		JUMLAH	II/d		II/c		II/b		II/a		JUMLAH	I/d		I/c		I/b		I/a		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P		
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	0	0	21	10	138	108	162	162	601	300	336	173	265	213	269	155	209	1920	124	83	79	65	32	20	14	5	422	2	0	2	1	1	0	1	0	7	2950

Sumber : BKPSDM Banggai Kepulauan

d. Jabatan

Tabel 1.4 : PNS berdasarkan Jabatan

INSTANSI	ESELON																					JF			JFT			JUMLAH
	II.a			II.b			III.a			III.b			IV.a			IV.b			V.a			U						
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	0	0	0	27	7	34	38	15	53	71	42	113	111	98	209	25	18	43	0	0	0	392	227	619	752	1127	1879	2950

Sumber : BKPSDM Banggai Kepulauan

Jumlah ASN PPPK :

Tabel 1.5 : Jumlah ASN PPPK

INSTANSI	L	P	JUMLAH
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	564	1109	1673

Sumber : BKPSDM Banggai Kepulauan

1.3 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam menjalankan pemerintahan yang menjadi urusan daerah. Meskipun Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang baru yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan Dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari :

1. Sekretariat
    a. Sekretariat Daerah
    b. Sekretariat DPRD
2. Dinas
    a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    b. Dinas Perikanan
    c. Dinas Kesehatan
    d. Satuan Polisi Pamong Praja
    e. Dinas Komunikasi dan Informatika
    f. Dinas Ketenagakerjaan danTransmigrasi
    g. Dinas Pariwisata
    h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    k. Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah
    l. Dinas Sosial
    m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
    0. Dinas Ketahanan Pangan
    o. Dinas Lingkungan Hidup
    p. Dinas Pemuda dan Olahraga
    q. Dinas Perhubungan

r. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
s. Dinas Pertanian
t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Badan
   a. Badan Pendapatan Daerah
   b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
   c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
   d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda)
   e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
4. Inspektorat
5. Rumah Sakit Trikora Salakan
6. Rumah Sakit Pratama
7. Perangkat Daerah lainnya
8. Kecamatan
9. Kelurahan

1.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar mendesak, berjangka menengah / Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

1.4.1 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu strategis yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode Tahun 2023-2026. Rumusan isu strategis Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

1) Infrastruktur kawasan ibukota belum optimal
2) Masih tingginya angka kemiskinan ekstrim
3) Infrsatruktur jalan belum memadai
4) Belum memadainya kualitas SDM khususnya bidang pendidikan, kesehatan, aparatur sipil negara, petani dan nelayan
5) Produktivitas dan produksi sektor pertanian/perikanan belum memadai
6) Masih tingginya angka stunting

1.4.2 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, LKjIP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LKjIP Tahun 2024 berupa Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan Dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Isu-isu Strategis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Rencana Kerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024, serta Rencana Kinerja Tahun 2024, sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Instansi Pemerintah serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 terkait dengan tugas pokok dan tugas- tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data-data pendukung penjelasan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja perangkat daerah pada Tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah “Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata”. Visi ini merupakan hasil ekstraksi dari segenap pemikiran, keinginan, harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dapat menjadi daerah yang memiliki daya saing, baik secara regional maupun nasional, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang adil, aman dan makmur, untuk terwujudnya pemerataan hasil pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Penjelasan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan :

Tabel 2.1 : Visi Kabupaten Banggai Kepulauan

VISI	POKOK VISI	PENJELASAN POKOK VISI
Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata	Berdaya Saing	Kondisi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang memiliki infrastruktur berdaya saing dalam mendukung kemajuan daerah
	Sejahtera dan Merata	Kondisi masyarakat dengan kualitas manusia yang tinggi dan tingkat kehidupan ekonomi yang berkecukupan dan merata

Sumber : RPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026

2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya pokok yang hendak dijalankan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan

atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Olehnya itu, maka rumusan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 2019-2024 seperti berikut seperti yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dan reformasi birokrasi daerah yang melayani;

   Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan dasarnya delapan karakteristik yakni: partisipasi aktif; tegaknya hukum (rule of law); transparansi; responsif; musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang; serta efektif dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Dimana dengan berlakunya karakteristik good governance tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjamin: meminimimalkan korupsi; pandangan minoritas diwakili dan dianggap; pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan.

   Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sebagaimana amanah dari pemerintah pusat. Good governance dapat dipahami, bahwa Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan dasarnya delapan karakteristik yakni: partisipasi aktif; tegaknya hukum (rule of law); transparansi; responsif; musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang; serta efektif dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Dimana dengan berlakunya karakteristik good governance tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjamin: meminimimalkan korupsi; pandangan minoritas diwakili dan dianggap; pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan.

   Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur

sebagaimana amanah dari pemerintah pusat. Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara (ASN) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

2. Mewujudkan Kuantitas dan kualitas SDM daerah yang Berdaya Saing (competitiveness) melalui Pendidikan dan kesehatan yang merata;

   Berdaya Saing dalam pengertian, bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki tingka produktivitas yang tinggi karena adanya kuantitas dan kualitas SDM yang andal, atau suatu keunggulan pembeda terdiri dari keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lainnya. Dimana, daya saing daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah kemampuan perekonomian daerah di Banggai Kepulauan untuk menggapai suatu pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan tanpa menutup pintu persaingan dengan wilayah atau daerah lainnya.

3. Meningkatkan pemeratan pembangunan dan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur daerah (regional infrastructure) yang maju;

   Pembangunan dan pemeraatan infrastuktur daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan ditujukkan untuk memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur daerah untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah kecamatan dan desa, serta peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah untuk dapat meringankan dan menurunkan biaya produksi menjadi lebih murah.

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteran masyarakat (social-economy welfare);

Perekonomian yang inklusif di Kabupaten Banggai Kepulauan diimplementasi melalui tiga pilar utama yaitu: pertama, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; kedua, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan ketiga, jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian lebih luas.

Kesejahteraan masyarakat (people welfare) di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan tujuan utama dari seluruh perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utama yang hendak dicapai (prime goal). Kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi (social economi welfare) secara bersama-sama. Melalui desentralisasi daerah, Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan keleluasaan dan peluang secara luas oleh pemerintah pusat untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat daerah menjadi lebih baik dan lebih maju.

5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan yang berkelanjutan (sustainable approach).

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mengikuti prinsip-prinsip atau pendekatan berkelanjutan, yaitu: pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang; kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari); ketiga, setiap aktivitas pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain di manapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang; dan keempat, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang (long run), dengan

tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kepasitas daya dukungnya.

Sasaran Pokok Pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025

VISI	MISI	SASARAN POKOK
”BANGKEP Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata”	MISI 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Baik (Good Governace) Dan Reformasi Birokrasi Daerah Yang Melayani.	Meningkatanya Kesadaran ASN dalam penerapan disiplin
		Menurunnya Kasus Hukum
		Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset
		Meningkatnya kualitas layanan publik (public service quality)
		Penurunan jumlah konflik
	MISI 2 : Mewujudkan Kuantitas Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Daya Saing Daerah Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya
		Manusia
		Makin tingginya rata-rata pendidikan masyarakat Bangkep
		terwujudnya harapan dan kualitas pendidikan Bangkep
		kualitas hidup masyarakat Bangkep makin baik
		Menurunnya angka Stanting setiap periode
		Meningkatanya Indeks Daya Saing
		Daerah
	MISI 3 : Meningkatkan Konektivitas Dan Pemeratan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kondisi baik dan sedang
		Meningkatnya Sanitasi layak masyarakat
		Meningkatnya elektrifikasi, pasokan listrik dan cadangan listrik
		Meningkatnya akses masyarakat pada layanan komunikasi
		Meningkatnya kualitas jaringan komunikasi di seluruh wilayah Bangkep
		Terlaksananya kondisi jaringan irigasi kondisi baik
		Bertambahnya rumah layak huni di setiap periode
		Meningkatnya akses masyarakat
		Bangkep pada air minum
		makin rendahnya areal kawasan kumuh

VISI	MISI	SASARAN POKOK
		Bertambahnya pasar tradisional di setiap periode yang beraktivitas rutin
		Bertambahnya jumlah terminal
		Bertambanya jumlah Pelabuhan
		Meningkatnya status Pelabuhan laut
	MISI 4 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Inkliusif Dan Peningkatan Kesejahteran Masyarakat	Stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah setiap periode dan makin berkualitas
		PDRB Per Kapita
		Makin Menurunnya angka Pengangguran
		Meningktanya Kesejahteraan Masyarakat setiap periode kepemimpinan
		Berkurangnya Desa Tertinggal
		Status Kabupaten diakhir periode RPJPD terentaskan dari ketertinggalan
		Pangan Harapan meningkat setiap periode kepemimpinan
		Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi meningkat peranya
		Berkembangnya Industri Kecil berbasis masyarakat
		peningkatan jumlah UMKM
		Produktif
		Berkembangnya ekonomi perdesaan
		Meningktanya Kesejahteraan Petani dan Nelayan
		Meningkatanya Produktivitas
		Perikanan
	MISI 5 : Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan;	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
		Hidup
		Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana
		Daya Dukung dan Tampung
		Lingkungan
		Terjaganya wilayah hutan
		Meningkatnya ketersedian sarana publik
		Berkurangnya lahan kritis

Sumber : RPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026

Selanjutnya arah kebijakan Pembangunan dalam RPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026 yaitu :

1. Mendorong pelayanan publik yang prima;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis daerah untuk memperkokoh struktur ekonomi daerah dan masyarakat yang tanggap bencana.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun 2024. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 di samping mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026, juga mengacu pada tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan RKP Nasional Tahun 2024.

RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

Sasaran pembangunan meliputi dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro, serta dimensi pemerataan pembangunan wilayah. Pembangunan manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup komponen pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta kemampuan daya beli masyarakat.

Dimensi ekonomi makro diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan dimensi pemerataan pembangunan wilayah diukur dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu strategis yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan selama periode Tahun 2023-2026. Rumusan isu strategis Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

1. Infrastruktur kawasan ibukota belum optimal

   Masalah infrastruktur di kawasan ibukota memang sering menjadi perhatian utama. Infrastruktur yang tidak optimal dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, sepertimelambatnya Pembangunan infrastruktur, kesulitan dalam mobilitas penduduk dan barang, serta pembatasan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kawasan tersebut secara keseluruhan. Beberapa masalah yang sering dihadapi termasuk kurangnya fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar yang memadai serta penataan Kawasan ibukota Selain itu, infrastruktur yang kurang baik juga dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk, misalnya akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

   Pemerintah perlu melakukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan infrastruktur kawasan ibukota untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi mobilitas yang lebih baik. Selain itu, penting untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan infrastruktur agar dapat mengatasi tantangan perkotaan yang semakin kompleks di masa depan.

2. Masih tingginya angka kemiskinan ekstrim

   Masih tingginya angka kemiskinan ekstrim memang menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak daerah saat ini. Kemiskinan ekstrim mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi individu dan komunitas yang terkena dampaknya, termasuk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak.

   Penting untuk mencari solusi yang tepat guna untuk mengatasi masalah ini, baik melalui kebijakan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, atau inisiatif masyarakat yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan investasi dalam infrastruktur sosial dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrim.

3. Infrsatruktur jalan belum memadai

Isu strategis ini menjadi isu strategis daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, isu ini mengindikasikan bahwa kondisi atau kualitas jalan saat ini dianggap kurang memadai atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan. Hal ini berdampak pada mobilitas barang dan jasa menjadi terhambat terutama diwilayah pegunungan yang menjadi pusat pertanian.

4. Belum memadainya kualitas SDM khususnya bidang pendidikan, kesehatan, aparatur sipil negara, petani dan nelayan

Permasalahan mengenai kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, aparatur sipil negara, petani, dan nelayan memang merupakan hal yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah serta berbagai pihak terkait. Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab belum optimalnya kualitas SDM di Indonesia antara lain:

a) Masih terdapat disparitas antara kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan serta antar daerah. Sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, standar kurikulum yang tidak selalu terpenuhi, dan kualifikasi guru yang bervariasi dapat menjadi hambatan.
b) Kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil sering kali tidak sebanding dengan di daerah perkotaan. Aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, kualitas layanan, dan keterbatasan tenaga medis yang terlatih menjadi tantangan utama.
c) Masih ditemukan masalah terkait birokrasi yang lambat dan tidak efisien, kurangnya kompetensi serta rendahnya motivasi dari sebagian aparat sipil negara.
d) Sektor pertanian dan perikanan masih menghadapi tantangan seperti akses terhadap teknologi pertanian yang modern, kurangnya pendidikan formal di bidang pertanian, serta masalah infrastruktur yang membatasi akses ke pasar. Sehingga diperlukan langkah-langkah ini perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari pemerintah, kerjasama antar berbagai stakeholder, serta alokasi sumber daya yang memadai agar dapat mencapai perbaikan yang signifikan dalam kualitas SDM di berbagai sektor tersebut.

5. Produktivitas dan produksi sektor pertanian/perikanan belum memadai

Produktivitas dan produksi dalam sektor pertanian dan perikanan adalah isu yang serius di beberapa daerah, termasuk di Indonesia, ini disebabkan karena :

a) Banyak petani dan nelayan masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien dan produktif. Kurangnya akses terhadap teknologi modern seperti irigasi, pupuk organik, dan peralatan pertanian yang canggih menjadi penghambat.
b) Petani dan nelayan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang baik dan mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen atau tangkapan mereka.
c) Kurangnya infrastruktur seperti jalan yang baik, gudang penyimpanan yang memadai, dan sistem transportasi yang efisien mempersulit distribusi hasil pertanian dan perikanan.
d) Perubahan iklim dan bencana alam sering kali berdampak buruk pada produksi pertanian dan perikanan. Banjir, kekeringan, atau cuaca ekstrem lainnya dapat menghancurkan tanaman atau mengganggu tangkapan ikan. Sehingga upaya yang berkelanjutan dan komprehensif dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan produktivitas serta produksi dalam sektor pertanian dan perikanan di Indonesia.

6. Masih tingginya angka stunting

Stunting adalah masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa anak-anak mengalami pertumbuhan terhambat secara fisik dan kognitif karena kekurangan gizi yang kronis, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan mereka. Beberapa faktor yang berkontribusi termasuk gizi buruk, infeksi berulang, dan praktik pemberian makan yang tidak tepat.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan akses terhadap gizi yang memadai selama masa kehamilan dan pertumbuhan awal anak-anak, mempromosikan praktik pemberian makan yang sehat dan gizi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dalam komunitas. Pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengurangi prevalensi

stunting dan meningkatkan kesehatan dan perkembangan anak-anak secara keseluruhan.

Sehingga selaras dengan arah kebijakan di tingkat nasional dan provinsi serta mengacu pada target Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan daerah guna mencapai target sasaran makro pembangunan pada tahun 2024 serta isu-isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan, maka ditetapkan tema tahun 2024 yaitu *"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang mendukung Daya Saing daerah".*

Gambar 1 Tema Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

Sumber : RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

Tema tersebut dijabarkan ke dalam, 5 (lima) prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 yaitu:

1. Optimalisasi infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu;
2. Peningkatan kualitas SDM pendidikan yang merata;
3. Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui optimalisasi potensi lokal;
4. Percepatan intervensi penurunan stunting; dan
5. Pelaksanaan pemilukada yang berkualitas.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10-7,10 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,85 – 1,00 %;

3. Gini Rasio (nilai) sebesar 0,235 – 0,255;
4. Indeks Pembangunan Manusia (nilai) sebesar 67,39 – 68,75; dan
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 11,15 – 11,99 %;

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Prioritas Pembangunan Kab. Banggai Kepulauan, Sasaran Daerah serta Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4		6	7
1	Optimalisasi infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	1 Buah	Program Pengelolaan pelayaran	DInas Perhubungan
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	66,12%	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,48 Indeks	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		Meningkatnya Jumlah Rumah LAyak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	78,42%	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
			Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	100%	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
		Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	79,04%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunkasi dan Informatika
		Mengingkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	70%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
		Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	80%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4		6	7
2	Peningkatan kualitas SDM pendidikan yang merata	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui optimalisasi potensi lokal	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	50	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Percepatan intervensipenurunan stunting	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kecamatan
					Program Pendaftaraan Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	100	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4		6	7
					Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai	76	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehuatanan, dan Perikanan	3,75	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	2,81	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4		6	7
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,5 Indeks	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,5 Indeks	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	68,5 Indeks	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	163 Indeks	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
					Program Penanganan Bencana	BPBD
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan	POLPP Damkar
					Penyelamatan Non Kebakaran	POLPP Damkar

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4		6	7
5	Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilukada yang berkualitas	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100 Persen	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	KESBANGPOL

Sumber : RPD Kab. Bangkep 2023-2026 (olahan bappeda)

2.4 Rencana Kerja 2024

Rencana kerja Tahun 2024 Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Banggai Kepulauan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai tujuan dan Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu terdiri 18 sasaran dengan 21 indikator yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tertuang dalam RKPD 2024 seperti pada tabel dibawah inisebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1	*2*	*3*	*5*
1	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	1 Buah
2	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	66,12%
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,48 Indeks
4	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Hunidan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	78,42%
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	100%
5	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	79,04%
6	Mengingkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	70%
7	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	80%
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	100%
9	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	100%

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1	*2*	*3*	*5*
10	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
11	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	100
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai	76
13	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehuatanan, dan Perikanan	3,75
14	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	2,81
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76
16	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,5 Indeks
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,5 Indeks
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	68,5 Indeks
17	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	163 Indeks
18	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100 Persen

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang. Skala pengukuran kinerja dipergunakan dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, dengan menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran:

a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala penilaian progres positif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Memuaskan
3	75% sampai 100%	Memuaskan
2	55% sampai 75%	Cukup Memuaskan
1	Kurang dari 55%	Kurang Memuaskan

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala penilaian progres negatif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Kurang Memuaskan
2	75% sampai 100%	Cukup Memuaskan
3	55% sampai 75%	Memuaskan
4	Kurang dari 55%	Sangat Memuaskan

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini akan dijelaskan capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Kinerja/Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	NILAI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	Jumlah Pelabuhan Laut	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100%	Memuaskan
2	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	87%	66,12%	35,27%	53.34%	Kurang Memuaskan
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,89	1,48	3,29	222%	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Jumlah Rumah LAyak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	-	78,42%	73,98%	94,34%	Memuaskan
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	16%	100%	17,17%	17,17%	Kurang Memuaskan
5	Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	160%	79,04%	134%	170%	Sangat Memuaskan
6	Mengingkatnya Cakupan Akses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	102%	70%	100%	143%	Sangat Memuaskan
7	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	103%	80%	100%	125%	Sangat Memuaskan
8	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	73%	100%	74,93%	74,93%	Cukup Memuaskan
9	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang kesehatan	76%	100%	78,81%	78,81%	Memuaskan
10	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	100%	Memuaskan
11	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	5,33	7.60%	7,35	97%	Memuaskan
12	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas Pegawai	76%	79,5%	81,24%	102%	Sangat memuaskan
13	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehuatanan, dan Perikanan	3,19%*	3,75	2,48%**	66.13%	Cukup Memuaskan
14	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	1,90%*	2,81%	2,21%**	79%	Memuaskan
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	54	76	67	87,50%	Memuaskan
16	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	102,19	68,5 Indeks	70,00	102,19%	Sangat memuaskan
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	98,57	94,5 Indeks	95,07	100,60%	Sangat memuaskan
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	66,67	68,5 Indeks	57,97	84,63%	Memuaskan

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	NILAI
17	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	163	163	159,41	98%	Memuaskan
18	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	74,73%	100 Persen	74,73%	74,73%	Cukup Memuaskan

Sumber : Perangkat Daerah Terkait

Keterangan Warna :

= Sangat Memuaskan

= Memuaskan

= Cukup Memuaskan

= Kurang Memuaskan

Diagram 1

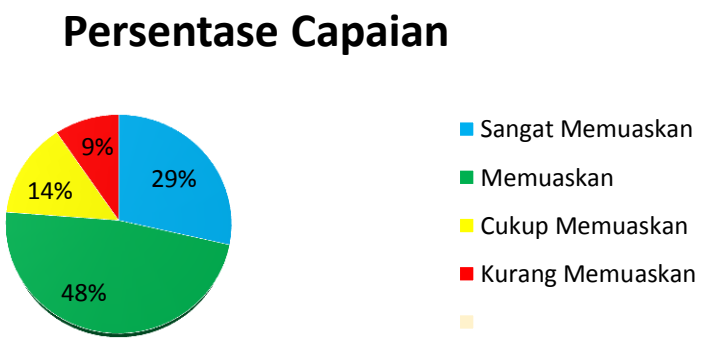

Indikator Sasaran Kinerja yang mendukung sasaran strategis dalam RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat Memuaskan sebanyak 6 indikator
- Memuaskan sebanyak 10 indikator
- Cukup Memuaskan 3 indikator
- Kurang memuaskan 2 indikator

Dari 21 Indikator Sasaran Kinerja di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 29% telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 48% telah memenuhi kriteria memuaskan, 14% masuk kriteria cukup memuaskan dan 9% masuk kriteria kurang memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian Indikator Sasaran Kinerja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.2 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan Tahun 2024 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran 1 Tersedianya Pelabuhan Laut Yang Memenuhi Standar

Analisis pencapaian Tujuan 1 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.4 Capaian Sasaran I

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Tersedianya Pelabuhan Laut yang memenuhi standar	1	Jumlah Pelabuhan Laut	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100%

Sumber : Perangkat Daerah terkait

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Jumlah Pelabuhan Laut dengan kategori capaian ***memuaskan.***

3.2.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap sasaran tersedianya pelabuhan laut yang memenuhi standar dan terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh kerja sama yang baik antar instansi serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah, sehingga sasaran daerah berupa tersedianya pelabuhan laut yang memenuhi standar dapat tercapai sesuai target

3.2.1.2 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan Laut adalah sebesar Rp 1.503.600.000, dengan realisasi sebesar Rp 1.442.330.000, atau sekitar 95,93%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 4,07%.

3.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan Untuk Konektivitas Wilayah

Analisis pencapaian sasaran 2 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.5 Capaian Sasaran 2

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	1	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	66,12%	87%	35,27%	53.34%

Sumber: Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2024

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten t mencapai target dengan Predikat ***sangat memuaskan***

3.2.2.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unit kerja yang dibebankan target pada sasaran ini. Keberhasilan pencapaian indikator persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten didukung dengan alokasi anggaran yang kurang memadai untuk mencapai target.

3.2.2.2 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten melalui Program penyelenggaraan jalan adalah Rp. 63.808.751.000 dan terealisasi sebesar Rp 49.628.294.313 atau sebesar 77,78% artinya terdapat efisiensi sebesar 22,22%.

3.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya Daya Saing Daerah

Analisis pencapaian sasaran 3 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.6 Capaian Sasaran 3

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Daya Saing Daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah	1,48 Indeks	2,89	3,29	222%

Sumber : Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2024

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Indeks Daya Saing Daerah telah mencapai target dengan Predikat ***sangat memuaskan***

3.2.3.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Indeks Daya Saing Daerah

Realisasi Indeks Daya Saing dipengaruhi oleh12 pilar yaitu :

1. Pilar 1 institusi dengan indeks 4,43
2. Pilar 2 Infrastruktur dengan indeks 2,56
3. Pilar 3 Adposi TIK dengan indeks 3,10

4. Pilar 4 Satabilitas Ekonomi dengan indeks 3,01
5. Pilar 5 Kesehatan dengan indeks 3,49
6. Pilar 6 Ketrampilan dengan indeks 4,14
7. Pilar 7 Pasar Produk dengan indeks 5,00
8. Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja dengan indeks 3,55
9. Pilar 9 Sistem Keuangan dengan indeks 2,10
10. Pilar 10 Ukuran Pasar dengan indeks 3,57
11. Pilar 11 Dinamika Bisnis dengan indeks 3,27
12. Pilar 12 Kapabilitas Inovasi dengan indeks 3,29

3.2.3.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Indeks Daya Saing Daerah adalah Rp 13.518.046.000 dan terealisasi sebesar Rp12.942.432.520 atau sebesar 95,74% artinya terdapat efisiensi sebesar 4,26%.

3.2.4 Sasaran 4 Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh

Analisis pencapaian sasaran 4 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.4.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.7 Capaian Sasaran 4

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Berkurangnya Kawasan Kumuh	1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80%	-	73,98%	94,34%
	2	Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	100%	16%	17,17%	17,17%

Sumber : Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2024

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan.

a. Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni mendapatkan predikat **cukup memuaskan**
b. persentase luas kawasan kumuh yang tertangani dengan predikat **kurang memuaskan.**

3.2.4.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

   Faktor yang menjadi kendala untuk pencapaian target indikator ini sebagai berikut:

   - Pada tahun 2023 kegiatan RTLH belum dilaksanakan yg disebabkan ketersediaan anggaran untuk mewujudkan pencapaian target pada indikator cakupan rumah layak huni.

   - Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk pencapaian target sesuai dengan indikator yang ada belum mencapai hasil sesuai dengan target yang direncanakan, diakibatkan keterbatasan alokasi anggaran.

   - Solusi yang disarankan akan di lakukan adalah tambahan anggaran untuk pembangunan rasio rumah layak huni.

b. Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani

   Penyebab pencapaian indikator ini belum mencapai target yang sudah ditetapkan dikarenakan tidak memenuhi 7 indikator kriteria kawasan kumuh, sehingga yang tertangani hanya kriteria bangunan Rumah Layak Huni dan Pembangunan jalan lingkungan di dalam kawasan permukiman kumuh.

3.2.4.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

   Anggaran yang diberikan untuk pencapaian Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni melalui Program Pengembangan Perumahan adalah Rp. 428.600.000 dan terealisasi sebesar

332.586.270 atau sebesar 77,60% artinya terdapat efisiensi sebesar 22,40%.

b. Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani

Anggaran yang diberikan untuk pencapaian Indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani pada Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh adalah Rp. 857.547.050 dan terealisasi sebesar Rp. 786.466.869 atau sebesar 91,71% artinya terdapat efisiensi sebesar 8,29%

3.2.5 Sasaran 5 Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi

Analisis pencapaian sasaran 5 dapat dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.6.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.8 Capaian Sasaran 5

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Terbangunnya Jaringan Komunikasi dan Informasi	1	Cakupan Layanan Komunikasi	79%	98%	98%	124%

Sumber : Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2024

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Cakupan Layanan Komunikasi dengan predikat capaian **Sangat Memuaskan.**

3.2.5.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dinas Komunkasi dan Informatika merupakan satu-satunya perangkat daerah yang dibebankan target untuk mencapai sasaran ini. Indikator ini di fokuskan pada Program Informasi dan Komunikasi Publik

Dukungan anggaran yang cukup sehingga Infrakstruktur Jaringan yang melayani seluruh OPD dapat terpenuhi.

3.2.5.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Cakupan Layanan Komunikasi melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik adalah Rp.4.324.227.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.144.177.377 atau sebesar 95,84% artinya terdapat efisiensi sebesar 4,16%

3.2.6 Sasaran 6 Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum

Analisis Pencapaian Sasaran 6 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.6.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.9 Capaian Sasaran 6

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum	1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	70%	102%	100,33%	143,33%

Sumber : Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2024

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Persentase Penduduk Berakses Air Minum dengan predikat capaian **Sangat Memuaskan.**

3.2.6.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dinas PUPR adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk pencapain target indicator ini. peningkatan target capaian akan terus di tingkatkan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

3.2.6.4 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator ini melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah Rp.21.337.440.000 dan terealisasi sebesar Rp.19.472.092.632,00 atau sebesar 91,26% artinya terdapat efisiensi sebesar 8,74%

3.2.7 Sasaran 7 Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak

Analisis Pencapaian Sasaran 7 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

1.2.7.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.10 Capaian Sasaran 7

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Memiliki Sanitasi layak	1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	80%	103%	113,59%	142%

Sumber: Perangkat Daerah yang Bersangkutan Tahun 2024

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dengan predikat capaian **Sangat Memuaskan.**

3.2.7.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dinas PUPR adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk pencapain target indicator ini. peningkatan target capaian akan terus di tingkatkan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

3.2.7.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator ini melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah

Rp.163.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp145.519.748,00 atau sebesar 89,11%artinya terdapat efisiensi sebesar 10,89%

3.2.8 Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan

Analisis Pencapaian Sasaran 8 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.8.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.11 Capaian Sasaran 8

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan	1	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	100%	73%	74,93%	74,93%

Sumber : Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2024

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar, memperoleh predikat capaian ***Cukup Memuaskan***

3.2.8.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada Indikator Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan satu-satunya perangkat daerah yang dibebankan target untuk sasaran ini. Fokus indikator ini adalah pada Program Pengelolaan Pendidikan.

Faktor faktor yang mempengaruhi capaian Indikator ini :

a) Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar 92,77%
b) Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 12-15 tahun dalam pendidikan Menengah Pertama 91,62%
c) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma (D.IV), S1 danSertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal 28,22%.

Hal-hal yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas bagi satuan PAUD, SD, dan SMP.
b. Komitmen untuk menjamin ketersediaan layanan pembangunan di sektor pendidikan untuk semua jenjang, khususnya pada jenjang pendidikan PAUD.
c. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun yang berkualitas.
d. Komitmen untuk menetapkan pembangunan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan.
e. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga terkait untuk memperbesar peluang bagi pendidik dalam mengembangkan kompetensinya, baik di bidang keilmuan maupun pedagogi, yang selama ini belum terlaksana dengan baik.Tingkat Partisipasi warga Usia 5-6 tahun dalam pendidikan Usia Dini
f. Tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan kompetensinya agar dapat diselaraskan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.2.8.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar melalui Program Pengelolaan Pendidikan adalah sebesar Rp 63.661.716.775, dengan realisasi sebesar Rp 51.939.409.424, atau sekitar 81,59%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 18,41%.

3.2.9 Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Analisis Pencapaian Sasaran 9 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.9.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.12 Capaian Sasaran 9

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN 2024

				2023	2024	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Capaian SPM bidang kesehatan	100%	76%	78,81%	78,81%

Sumber : Perangkat Daerah yang bersangkutan Tahun 2024

3.2.9.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Capaian SPM bidang kesehatan

Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai indikator kinerja persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, yang berhasil memperoleh predikat capaian **memuaskan.**

Faktor Pendukung untuk mencapai target pada indikator SPM bidang kesehatan antara lain :

1) Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, alat Kesehatan, makanan dan minuman sebesar 82,24%
2) Persentase PSKS dan KAT yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebesar 95,65%
3) Persentase Keluarga pra Sejahtera ke Keluarga Sejahtera 100%

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target indikator kinerja capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya jumlah tenaga medis.
b. Kurangnya Anggaran: Kekurangan anggaran dapat berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
c. Manajemen Monitoring dan Evaluasi: Manajemen monitoring dan evaluasi yang kurang optimal dapat menghambat pencapaian SPM.
d. Karakteristik Masyarakat: Budaya dan kesadaran masyarakat dapat menjadi faktor eksternal yang menghambat pencapaian SPM.

Alternatif solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah:

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Puskesmas.
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai.

3.2.9.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Capaian SPM bidang kesehatan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah sebesar Rp.9,593,521,316, dengan realisasi sebesar Rp.8,052,575,158, atau sekitar 83.94%Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 16.06%

3.2.10 Sasaran 10 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Analisis Pencapaian Sasaran 10 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.10.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.13 Capaian Sasaran 10

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	100%

Sumber: Perangkat Daerah yang Bersangkutan Tahun 2024

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), memperoleh predikat capaian **Memuaskan.**

3.2.10.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta 12 Kecamatan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator ini. Berikut adalah analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi serta solusi yang telah diterapkan:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa faktor yang masih perlu diatasi untuk peningkatan capaian indikator ini antara lain:

a. Keterbatasan anggaran, terutama dalam hal sarana dan prasarana yang kurang memadai.
b. Keterbatasan tenaga pelaksana dalam memberikan pelayanan.
c. Keterbatasan jangkauan layanan.
d. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan alternatif solusi berupa pelayanan keliling ke 12 kecamatan untuk dokumen kependudukan yang meliputi :

a. Kartu Keluarga.
b. KTP Elektronik.
c. Kartu Identitas Anak.
d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk.

2. Kecamatan

Dengan adanya dukungan alokasi anggaran yang cukup, pencapaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

3.2.10.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

1. Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Program Pendaftaran Penduduk adalah sebesar Rp157.604.000, dengan realisasi sebesar Rp157.350.000, atau sekitar 99,84%Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,16%

2. Kecamatan

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 12 kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar Rp 25.334.676.000. Realisasi anggaran tersebut mencapai Rp 23.827.163.136, yang setara dengan

sekitar 94,05% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5,95%.

3.2.11 Sasaran 11 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Analisis Pencapaian Sasaran 11 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.11.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.11 Capaian Sasaran 11

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	7.60%	5,33	7,35**	97%

*Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS Banggai Kepulauan

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata, memperoleh predikat capaian **Memuaskan.**

3.2.11.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

a. ketersediaan sarana prasarana pada destinasi unggulan antara lain gazebo, toilet, mushola dan diving centre.
b. Pemasaran yg tepat sasaran, pemanfaatan media sosial dan kerja sama dgn influencer dapat meningkatkan visibilitas destinasi yg berdampak pada peningkatan kunjungan wisata
c. Peningkatan pemahaman tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada setiap produk atau karya seni bagi pelaku usaha ekonomi kreatif

3.2.11.2 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata pada 4 program pembangunan daerah :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
b. Program Pemasaran Pariwisata
c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Sebesar Rp 2.284.352.089, dengan realisasi sebesar Rp2.202.517.104, atau sekitar 96,42%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 3,58%.

3.2.12 Sasaran 12 Meningkatnya Profesionalitas Pegawai

Analisis Pencapaian Sasaran 12 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.12.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.15 Capaian Sasaran 12

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	1	Indeks Profesionalitas Pegawai	80%	76%	81,24%	102%

Sumber: Perangkat Daerah yang Bersangkutan Tahun 2024

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah meningkatnya profesionalitas pegawai, yang memperoleh kategori capaian **sangat memuaskan**.

3.2.12.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Meskipun capaian telah melebihi target yang ditetapkan, untuk meningkatkan target capaian indikator ini di tahun-tahun mendatang, diperlukan anggaran yang lebih besar. Hal ini diperlukan untuk mendanai berbagai kegiatan peningkatan profesionalitas ASN, seperti pemberian bantuan tugas belajar, diklat, bimtek, seminar, dan uji kompetensi. Selain itu, koordinasi dan kerja sama antar instansi juga perlu ditingkatkan guna mendukung upaya peningkatan profesionalitas ASN.

3.2.12.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator ini melalui Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar Rp 3.558.960.000 dengan realisasi sebesar Rp3.479.738.359 atau sekitar 97,77%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 2,23%

3.2.13 Sasaran 13 Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Analisis Pencapaian Sasaran 13 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.13.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.16 Capaian Sasaran 13

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75%	3,19%*	2,48%**	66.13%

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Banggai Kepulauan

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan predikat capaian ***cukup memuaskan.***

3.2.13.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan.

a. Dinas Pertanian

Salah satu faktor yang menyebabkan belum tercapainya target dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Solusi yang diambil untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan survei terlebih dahulu sesuai dengan kegiatan yang akan direncanakan sebelum anggaran disetujui.

b. Dinas Perikanan

Faktor yang mempengaruhi capaian pada indikator ini antara lain :

1. Program Perikanan Tangkap dan Budidaya

   Realisasi pada program ini telah melebihi target yang ditetapkan, yang menunjukkan peningkatan jumlah produksi tangkap dan budidaya perikanan.

2. Program Pengolahan Hasil Perikanan

   Meskipun demikian, program pengolahan hasil perikanan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya transportasi dan aksesibilitas pemasaran perikanan, serta terbatasnya akses permodalan.

3. Anggaran dan Sisa Anggaran (Silpa)

   Terdapat sisa anggaran (silpa) yang disebabkan oleh ketidaksiapan penerima bantuan untuk menerima dana yang tersedia.

Solusi yang Diusulkan:

1. Memperbaiki perencanaan pengadaan agar lebih efektif.
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi kembali terhadap data dan permintaan dari kelompok penerima bantuan.

3.2.13.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

a. Dinas Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk Mendukung pencapaian indikator ini melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah sebesar Rp 1.700.514.534 dengan realisasi sebesar Rp1.629.619.395 atau sekitar 95,83%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 4,17%.

b. Dinas Perikanan

Anggaran yang dialokasikan untuk Mendukung pencapaian indikator ini melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan adalah sebesar Rp 11.937.900.010 dengan realisasi sebesar Rp9.208.062.827 atau sekitar 77,13%Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 22,87%.

3.2.14 Sasaran 14 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian

Analisis Pencapaian Sasaran 14 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.14.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.17 Capaian Sasaran 14

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	1	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	2,81%	1,90%*	2,21%**	79%

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Banggai Kepulauan

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian target indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian mencapai predikat ***Memuaskan.***

3.2.14.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penurunan capaian target indikator pertumbuhan PDRB sektor perindustrian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Masalah Sumber Daya Manusia: Terjadi kekurangan keterampilan pada tenaga kerja industri yang terlatih, yang menghambat efisiensi dan produktivitas.
2. Ketersediaan Infrastruktur: Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan biaya produksi yang tinggi dan menghambat kelancaran distribusi hasil produksi.
3. Ketergantungan pada Teknologi Lama: Penggunaan teknologi yang sudah usang mempengaruhi produktivitas dan daya saing industri, mengurangi kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.
4. Fluktuasi Harga Komoditas: Harga bahan baku dan bahan tambahan yang fluktuatif dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perhitungan biaya produksi dan mengurangi keuntungan industri pengolahan.
5. Faktor Pembiayaan/Permodalan: Banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha mereka.

Sebagai alternatif solusi, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah mengadakan pelatihan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penggunaan teknologi yang mendukung kegiatan produksi, serta menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait untuk memfasilitasi pembiayaan dan pengembangan usaha

3.2.14.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk Mendukung pencapaian indikator ini melalui Program Perencanaan dan Pengembangan Industri adalah sebesar Rp 199.999.900 dengan realisasi sebesar Rp 183.407.460 atau sekitar 91,70%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 8,30%

3.2.15 Sasaran 15 Meningkatnya Ketahanan Pangan

Analisis Pencapaian Sasaran 15 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.15.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.18 Capaian Sasaran 15

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	Indeks Ketahanan Pangan	76	54	67	87,50%

Sumber: Perangkat Daerah yang Bersangkutan Tahun 2024

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian target indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Dinas Ketahanan Pangan. Indikator Indeks Ketahanan Pangan mencapai predikat ***Memuaskan.***

3.2.15.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian target pada indicator ini akan lebih ditingkatkan. Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk daerah dengan kerawanan pangan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, penanganan serius dari OPD terkait sangat diperlukan, didukung dengan pendanaan yang memadai. Beberapa intervensi yang telah dilakukan meliputi pemberian bantuan beras bagi daerah rawan pangan, pemberian bantuan sosial berupa bahan

pangan, serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita stunting pada tahun 2024

3.2.15.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Anggaran yang dialokasikan untuk Mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 199.999.900 dengan realisasi sebesar Rp 183.407.460 atau sekitar 91,70%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 8,30%

3.2.16 Sasaran 16 Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Analisis Pencapaian Sasaran 16 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.16.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.19 Capaian Sasaran 16

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan antara Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	68,5 Indeks	102,19	70,00	102,19%
	2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,5 Indeks	98,57	95,07	100,60%
	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	68,5 Indeks	66,67	57,97	84,63%

Sumber: Perangkat Daerah yang Bersangkutan Tahun 2024

Satu-satunya Satu-satunya Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian target indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Capaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) berhasil mencapai predikat ***Sangat Memuaskan***, sementara Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) memperoleh predikat ***Memuaskan.***

3.2.16.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Pencapaian target indikator ini telah melebihi ekspektasi. Namun, kegiatan pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai, dengan cara menghindari aktivitas yang dapat menambah beban pencemaran, akan tetap dilaksanakan secara konsisten.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pencapaian target indikator ini juga melebihi target. Kegiatan uji kualitas udara di empat titik, yaitu wilayah pemukiman, perkantoran, industri, dan titik kepadatan transportasi, masih terus dilaksanakan. Selain itu, kegiatan konservasi juga terus dilakukan secara berkelanjutan.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)

Untuk mencapai target pada indikator ini, ketersediaan anggaran masih menjadi factor yang berpengaruh pada pencapaian target. beberapa langkah terus dilaksanakan, antara lain penghijauan dengan penanaman pohon di sepanjang jalan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3.2.16.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Anggaran yang dialokasikan untuk Mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 197.207.000 atau sekitar 98,60% Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 1,40%

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Anggaran yang dialokasikan untuk Mendukung pencapaian indikator ini melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp 30.005.940 dengan realisasi sebesar Rp 27.415.940 atau sekitar 91,37%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 8,63%.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)

Melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Anggaran yang dialokasikan untuk Mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 39.722.000 dan penggunaan anggaran terserap 100%.

3.2.17 Sasaran 17 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Analisis Pencapaian Sasaran 17 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.17.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.20 Capaian Sasaran 17

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN 2024
				2023	2024	
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Resiko Bencana	163 Indeks	163	159,41	98%

Sumber: Perangkat Daerah yang Bersangkutan Tahun 2024

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian target indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja bidang Pemadam Kebakaran. Indikator Indeks Resiko Bencana mencapai predikat ***memuaskan***

3.2.17.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyerapan anggaran pada program penanggulangan bencana sangat kecil, di sebabkan karena Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tidak terjadi resiko bencana yang besar. Sehingga kegiatan penaggulangan bencana belum dilaksanakan. Namun

penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terus dilaksanakan.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadam Kebakaran

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator ini antara lain adalah kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Hal ini menyebabkan petugas pemadam kebakaran tidak dapat mencapai waktu respons (response time) 15 menit, karena lokasi kejadian kebakaran berada lebih dari 7 km dari pos pemadam. Oleh karena itu, diperlukan penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di setiap wilayah kecamatan

3.2.17.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Melalui Program Penanggulangan Bencana, Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 31,522,260,621 dengan realisasi hanya sebesar Rp. 1,678,771,200 atau sekitar 5.33%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 94.67%.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadam Kebakaran

Melalui Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran, Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 854.968.000 dengan realisasi sebesar Rp. 852.654.985 atau sekitar 99,73%Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,27%.

3.2.18 Sasaran 18 Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Analisis Pencapaian Sasaran 18 dapat Dijelaskan dengan melihat Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini sebagai berikut :

3.2.18.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.21 Capaian Sasaran 18

SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

STRATEGIS		KINERJA	2024			2024
				2023	2024	
MeningkatnyaPeran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100 %	74,73%	74,73%	74,73%

Sumber: Perangkat Daerah yang Bersangkutan Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian target indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini. Indikator Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik mencapai predikat ***cukup memuaskan***

3.2.18.2 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Ketersediaan anggaran masih menjadi faktor penting untuk pencapaian target indikator ini. Komunikasi yang efektif antara pembuat program dan pelaksana program dapat menciptakan kesamaan pandangan dan pemikiran, Komunikasi yang baik di lapangan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja, selain itu Sumber daya yang memadai dapat mendukung keefektifan pelaksanaan program, Ketersediaan biaya, media, dan sarana prasarana dapat mendukung keberhasilan program dan meningkatkan kinerja.

3.2.18.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Dana

Melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 43.501.748.894 dengan realisasi sebesar Rp.43.500.400.520 atau sekitar 99,997%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,003%

3.3 Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2024, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Garis besar APBD Tahun 2024 dan realisasinya berdasarkan data, adalah sebagai berikut:

PEMERINTAHAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN

RINGKASAN LAPORAN

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 3.3.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI 2024 (Rp.)	% 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	PENDAPATAN DAERAH	1.068.100.041.997,17	994.667.392.659,06	93,12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.571.939.076,17	18.685.204.278,06	31,90
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.571.939.076,17	18.685.204.278,06	31,90
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	980.678.845.921,00	947.132.931.381,00	96,58
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	825.687.611.344,00	792.892.750.524,00	96,03
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -	118.284.533.000,00	118.284.533.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	36.706.701.577,00	35.955.647.857,00	97,95
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	980.678.845.921,00	947.132.931.381,00	96,58
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.849.257.000,00	28.849.257.000,00	100,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.849.257.000,00	28.849.257.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.068.100.041.997,17	994.667.392.659,06	93,12
5	BELANJA DAERAH	1.120.333.977.631,31	978.193.794.276,00	87,31
5.1	BELANJA OPERASI	719.419.336.562,00	639.476.448.672,00	88,89
	JUMLAH BELANJA OPERASI	719.419.336.562,00	639.476.448.672,00	88,89
5.2	BELANJA MODAL	231.751.715.027,50	170.282.302.937,00	73,48
	JUMLAH BELANJA MODAL	231.751.715.027,50	170.282.302.937,00	73,48
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	987.462.374,81	259.579.000,00	26,29
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	987.462.374,81	259.579.000,00	26,29
5.4	BELANJA TRANSFER	168.175.463.667,00	168.175.463.667,00	100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	168.175.463.667,00	168.175.463.667,00	100,00

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI 2024 (Rp.)	% 2024
	JUMLAH BELANJA	1.120.333.977.631,31	978.193.794.276,00	87,31
	SURPLUS/DEFISIT	-52.233.935.634,14	16.473.598.383,06	(31,54)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	52.233.935.634,14	52.235.816.634,59	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.593.935.634,14	55.595.816.634,59	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.593.935.634,14	55.595.816.634,59	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	52.233.935.634,14	52.235.816.634,59	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	68.709.415.017,65	0,00

Sumber : BPKAD Bangkep 2024

3.3.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi target yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni dari target sebesar Rp. 1.068.100.041.997,17 dan terealisasi sebesar Rp.994.667.392.659,06 atau 93,12%

3.3.2 Belanja Daerah

Realisasi untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi target seperti yang telah direncanakan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp. 1.120.333.977.631,31 dan Terealisasi sebesar Rp.978.193.794.276,00 atau 87,31%

3.3.4 Pembiayaan Daerah

Realiasi Anggaran untuk Pembiayaan daerah terbagi atas dua yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah telah memenuhi target yang telah direncakana dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah senilai Rp. 55.593.935.634,14 dan Terealisasi sebanyak Rp. 55.593.935.634,14 atau **100%.**
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah senilai Rp. 3.360.000.000,00 dan Terealisasi sebanyak Rp. 3.360.000.000,00 atau **100%.**

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran.
2. Mengupayakan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur.
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan tepat waktu.
4. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan penerimaan daerah.
5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

3.3.5 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil mendapatkan penghargaan pada tingkat provinsi dan nasional, diantaranya:

1. SAKIP AWARD 2024 predikat sakip dari CC ke B (Baik)

BAB IV
PENUTUP

Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan, yang membandingkan antara rencana, pencapaian kegiatan dengan realisasi sasaran, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran diukur dari tercapainnya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat skala nilai kinerja tinggi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dan berdasarkan realisasi anggaran, penggunaan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2024 adalah sebanyak Rp.1.068.100.041.997,17 dan terealisasi sebesar Rp994,667,392,659.06 atau 93.12%. secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Instansi Pemeritah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 93.12%. dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah dioptimal dan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Banggai Kepulauan.

Salakan, 25 Maret 2025

RUSLI MOIDADY